



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR : 8**

**TAHUN : 2003**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 7 TAHUN : 2003**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perencanaan Strategis Kabupaten Temanggung Tahun 2002/2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);
22. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan:** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2003

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2003 adalah sebagai berikut :

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Daerah | Rp. 296.709.046.000,-             |
| 2. Anggaran Belanja Daerah    | <u>Rp. 293.936.816.000,-</u>      |
| <b>Surplus</b>                | <u><u>Rp. 3.172.230.000,-</u></u> |

3. Anggaran Pembiayaan Daerah :

- a. Penerimaan Rp. 16.520.770.000,-
- b. Pengeluaran Rp. 19.693.000.000,-

**Selisih**

Rp. 3.172.230.000,-

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Anggaran Pembiayaan Daerah;
2. Lampiran II : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah
3. Lampiran III : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan
4. Lampiran IV : Daftar Pinjaman Daerah
5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan
7. Lampiran VII : A. Anggaran Pendapatan Daerah  
B. Belanja Daerah  
C. Pembiayaan Daerah

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 8 Pebruari 2003

**BUPATI TEMANGGUNG**

**CAP TTD**

**SARDJONO**

Diundangkan di Temanggung  
Pada tanggal 8 Pebruari 2003

**SEKRETARIS DAERAH**

**CAP TTD**

**SOERADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 8**

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2003**

| NOMOR     | URAIAN                                  | JUMLAH |                 |
|-----------|---|--------|-----------------|
| 1         | 2                                       | 3      |                 |
| <b>I</b>  | <b>PENDAPATAN</b>                       |        |                 |
| 1.1       | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>           | Rp.    | 34.074.300.000  |
| 1.1.1     | Pajak Daerah                            | Rp.    | 2.918.000.000   |
| 1.1.2     | Retribusi Daerah                        | Rp.    | 12.424.600.000  |
| 1.1.3     | Bagian Laba Usaha Daerah                | Rp.    | 1.312.000.000   |
| 1.1.4     | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah        | Rp.    | 17.419.700.000  |
| 1.2       | <b>Dana Perimbangan</b>                 | Rp.    | 247.331.746.000 |
| 1.2.1     | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak        | Rp.    | 9.643.539.000   |
| 1.2.2     | Dana Alokasi Umum                       | Rp.    | 221.660.000.000 |
| 1.2.3     | Dana Alokasi Khusus                     | Rp.    | 7.500.000.000   |
| 1.2.4     | Dana Perimbangan dari Propinsi          | Rp.    | 8.528.207.000   |
| 1.3       | Lain-lain Pendapatan yang sah           | Rp.    | 15.303.000.000  |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                | Rp.    | 296.709.046.000 |
| <b>II</b> | <b>BELANJA</b>                          |        |                 |
| 2.1       | <b>APARATUR DAERAH</b>                  | Rp.    | 178.823.872.000 |
| 2.1.1     | <b>Belanja Administrasi Umum</b>        | Rp.    | 148.233.352.000 |
| 2.1.1.1   | Belanja Pegawai                         | Rp.    | 141.481.086.000 |
| 2.1.1.2   | Belanja Barang dan Jasa                 | Rp.    | 5.127.666.000   |
| 2.1.1.3   | Belanja Perjalanan Dinas                | Rp.    | 523.478.000     |
| 2.1.1.4   | Belanja Pemeliharaan                    | Rp.    | 1.101.122.000   |
| 2.1.2     | <b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b> | Rp.    | 29.756.734.000  |
| 2.1.2.1   | Belanja Pegawai                         | Rp.    | 25.170.758.000  |
| 2.1.2.2   | Belanja Barang dan Jasa                 | Rp.    | 3.114.116.000   |
| 2.1.2.3   | Belanja Perjalanan Dinas                | Rp.    | 0               |
| 2.1.2.4   | Belanja Pemeliharaan                    | Rp.    | 1.471.860.000   |
| 2.1.3     | <b>Belanja Modal</b>                    | Rp.    | 833.786.000     |
| 2.2       | <b>PELAYANAN PUBLIK</b>                 | Rp.    | 77.881.971.000  |
| 2.2.1     | <b>Belanja Administrasi Umum</b>        | Rp.    | 9.943.512.500   |
| 2.2.1.1   | Belanja Pegawai                         | Rp.    | 6.948.721.500   |
| 2.2.1.2   | Belanja Barang dan Jasa                 | Rp.    | 441.921.000     |
| 2.2.1.3   | Belanja Perjalanan Dinas                | Rp.    | 2.200.620.000   |
| 2.2.1.4   | Belanja Pemeliharaan                    | Rp.    | 352.250.000     |



| 1          | 2  | 3                   |
|------------|--|---------------------|
| 2.2.2      | <b>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</b>        | Rp. 14.611.164.900  |
| 2.2.2.1    | Belanja Pegawai                                | Rp. 3.686.532.370   |
| 2.2.2.2    | Belanja Barang dan Jasa                        | Rp. 8.108.384.380   |
| 2.2.2.3    | Belanja Perjalanan Dinas                       | Rp. 978.486.150     |
| 2.2.2.4    | Belanja Pemeliharaan                           | Rp. 1.837.762.000   |
| 2.2.3      | Belanja Modal                                  | Rp. 53.327.293.600  |
| 2.3        | <b>BELANJA TRANSFER</b>                        | Rp. 34.530.973.000  |
| 2.4        | <b>BELANJA TAK TERSANGKA</b>                   | Rp. 2.300.000.000   |
|            | <b>JUMLAH BELANJA</b>                          | Rp. 293.536.816.000 |
| <b>III</b> | <b>PEMBIAYAAN</b>                              |                     |
| 3.1        | <b>Penerimaan Daerah</b>                       |                     |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu     | Rp. 15.670.770.000  |
| 3.1.1      | Transfer dari Dana Cadangan                    | Rp. 850.000.000     |
| 3.1.1      | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi               | Rp. 0               |
| 3.1.4      | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan    | Rp. 0               |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>                | Rp. 16.520.770.000  |
| 3.2        | <b>Pengeluaran Daerah</b>                      |                     |
| 3.2.1      | Transfer ke Dana Cadangan                      | Rp. 0               |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal                               | Rp. 2.193.000.000   |
| 3.2.3      | Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo        | Rp. 17.500.000.000  |
| 3.2.4      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan | Rp. 0               |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>               | 19.693.000.000      |
|            | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>                       | Rp. (3.172.230.000) |
| 1.4        | <b>PERHITUNGAN FIAK KETIGA</b>                 | Rp. 13.777.526.000  |

**DAFTAR REKAPITULASI APBD MENURUT BIDANG PEMERINTAHAN  
DAN UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

| NO. | BIDANG DAN UNIT KERJA           | JUMLAH                 | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|------------------------|------------|
|     | <b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>     | <b>293.536.816.000</b> |            |
| I   | <b>BIDANG UMUM PEMERINTAHAN</b> | <b>96.026.815.000</b>  |            |
| 1   | DPRD                            | 8.650.878.000          |            |
| 2   | SEKRETARIAT DPRD                | 2.499.418.000          |            |
| 3   | BUPATI                          | 763.261.000            |            |
| 4   | SEKRETARIAT DAERAH              | 42.252.895.000         |            |
| 5   | BADAN PENGAWAS                  | 1.109.152.000          |            |
| 6   | B A P P E D A                   | 2.859.463.000          |            |
| 7   | DINAS PENDAPATAN DAERAH         | 1.520.837.000          |            |
| 8   | KECAMATAN TEMANGGUNG            | 3.067.574.000          |            |
| 9   | KECAMATAN TEMBARAK              | 1.374.736.000          |            |
| 10  | KECAMATAN PRINGSURAT            | 1.655.972.000          |            |
| 11  | KECAMATAN KALORAN               | 1.484.121.000          |            |
| 12  | KECAMATAN PARAKAN               | 1.570.869.000          |            |
| 13  | KECAMATAN BULU                  | 1.466.611.000          |            |
| 14  | KECAMATAN KEDU                  | 1.409.634.000          |            |
| 15  | KECAMATAN KANDANGAN             | 1.534.625.000          |            |
| 15  | KECAMATAN CANDIROTO             | 1.426.266.000          |            |
| 17  | KECAMATAN NGADIREJO             | 1.700.326.000          |            |
| 18  | KECAMATAN JUMO                  | 1.354.035.000          |            |
| 19  | KECAMATAN WONOBOYO              | 1.283.286.000          |            |
| 20  | KECAMATAN KRANGGAN              | 1.507.493.000          |            |
| 21  | KECAMATAN BEJEN                 | 1.776.426.000          |            |
| 22  | KECAMATAN KLEDUNG               | 1.519.047.000          |            |
| 23  | KECAMATAN BANSARI               | 1.301.802.000          |            |
| 24  | KECAMATAN TLOGOMULYO            | 1.269.698.000          |            |
| 25  | KECAMATAN SELOPAMPANG           | 1.407.286.000          |            |
| 26  | KECAMATAN GEMAWANG              | 1.680.891.000          |            |
| 27  | KECAMATAN TRETEP                | 1.062.752.000          |            |
| 28  | KANTOR ARSIP DAERAH             | 402.541.000            |            |
| 29  | KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL     | 716.921.000            |            |
| 30  | KANTOR KESBANG LINMAS           | 1.957.953.000          |            |
| 31  | KANTOR P M D                    | 949.134.000            |            |
| 32  | KANTOR SATPOL PP                | 1.491.312.000          |            |
| II  | <b>BIDANG INFRASTRUKTUR</b>     | <b>49.017.645.000</b>  |            |
| 1   | DINAS PEKERJAAN UMUM            | 47.192.187.000         |            |
| 2   | KANTOR PERHUBUNGAN              | 1.825.458.000          |            |

| NO. | BIDANG DAN UNIT KERJA                        | JUMLAH          | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------|------------|
| III | BIDANG PELAYANAN UMUM                        | 135.342.673.000 |            |
| 1   | BADAN PENGELOLA RSUD                         | 13.632.815.000  |            |
| 2   | PUSKESMAS                                    | 524.158.000     |            |
| 3   | DINAS KESEHATAN KABUPATEN                    | 10.040.303.000  |            |
| 4   | KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUKAN          | 620.794.000     |            |
| 5   | KANTOR PERPUSTAKAAN                          | 364.678.000     |            |
| 6   | DINAS PENDIDIKAN                             | 107.362.185.000 |            |
| 7   | DINAS TENAGA KERJA TRANMIGRASI               | 2.797.740.000   |            |
| IV  | BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN EKONOMI DAERAH | 13.149.683.000  |            |
| 1   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN          | 1.252.108.000   |            |
| 2   | DINAS PERTANIAN                              | 5.392.441.000   |            |
| 3   | DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN               | 2.969.826.000   |            |
| 4   | KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN             | 1.055.509.000   |            |
| 5   | KANTOR KOPERASI DAN UKM                      | 339.745.000     |            |
| 6   | KANTOR PENGELOLAAN PASAR                     | 2.140.054.000   |            |

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI  
PERGOLONGAN DAN TENAGA KONTRAK  
PER JANUARI 2003**

| NOMOR | GOLONGAN                                     | JUMLAH       |
|-------|--|--------------|
|       | 2  | 3            |
|       | IV/e   | 1            |
|       | IV/d   | 1            |
|       | IV/c   | 7            |
|       | IV/b   | 25           |
|       | IV/a   | 736          |
| 1     | <b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>                    | <b>770</b>   |
|       | III/d  | 1.122        |
|       | III/c  | 1.494        |
|       | III/b  | 1.225        |
|       | III/a  | 1.060        |
| 2     | <b>JUMLAH GOLONGAN III</b>                   | <b>4.901</b> |
|       | II/d   | 735          |
|       | II/c   | 460          |
|       | II/b   | 351          |
|       | II/a   | 363          |
| 3     | <b>JUMLAH GOLONGAN II</b>                    | <b>1.909</b> |
|       | I/d  | 174          |
|       | I/c  | 33           |
|       | I/b  | 10           |
|       | I/a  | 0            |
| 4     | <b>JUMLAH GOLONGAN I</b>                     | <b>217</b>   |
| a     | <b>JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (1+2+3+4)</b> | <b>7.797</b> |
| b     | <b>JUMLAH TENAGA KONTRAK</b>                 | <b>854</b>   |
|       | <b>JUMLAH SELURUHNYA (a+b)</b>               | <b>8.651</b> |

**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**  
Tanggal , 31 Desember 2002

| URAIAN   | Tanggal/No.<br>SK.BUPATI<br>dan PERSETUJUAN<br>DPRD  | SALDO AWAL<br>tgl.1 Januari 2002<br>Rp. | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR<br>tgl.31 Desember 2002<br>Rp. |  |
|--|--|---|------------|-------------|--|--|
| 1  | 2  | 3                                       | 4          | 5           | 6  | 7  |
| ADB-LOAN 1198 INO<br><br>SLA-846/DP3/1996<br>Tgl.19 Januari 1996<br><br>Pinjaman dari<br>PT.Bank BPD Jawa Tengah | 12 September 1995<br>No. 650/3195/95<br>27 Pebruari 1995<br>No.70/2-IV/1994-1995<br><br>1 April 2002<br>No. 903/072/2002<br>1 April 2002<br>No. DPRD 19/1-III/2002 | 2.037.641.270                           | -          |             | 2.037.641.270                              | Untuk<br>Proyek P3KT<br><br><br><br><br>Untuk Proyek<br>Pembangunan 2002 |
|  | JUMLAH   | 2.037.641.270                           | 0          | 0           | 2.037.641.270                              |  |

1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun

2) Diisi tanggal pada awal bulan atau awal tahun

3) Diisi Periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengantanggal pada saldo akhir

**DAFTAR INVESTASI DAERAH**  
Tanggal, 31 Desember 2002

| URAIAN           | Tahun Pertama Investasi | Nama Perusda / Lembaga Rp.    | SALDO AWAL Tgl. 2 Jan 2002 | PENAMBAHAN Tgl. 2 Jan 2002 | PENGURANGAN Tgl. 2 Jan 2002 | SALDO AKHIR tgl.31 Desember 2002 Rp. | PENJELASAN |
|------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1                | 2                       | 3                             | 4                          | 5                          |                             | 6                                    | 7          |
| 1. Modal / Saham | 1977                    | BPR Bank Pasar                | 1.257.968.916              |                            |                             | 1.257.968.916                        |            |
| 2. Modal         | 1990                    | Perusda Apotik Waringin Mulyo | 83.125.110                 | 311.850.000                |                             | 394.975.110                          |            |
| 3. Modal PDAM    | 1986                    | Perusda Air Minum             | 2.902.920.353              | 145.683.000                |                             | 3.048.603.353                        |            |
| 4. Saham / Modal | 1976                    | PT.Bank BPD Jateng Cab.Tmg    | 840.000.000                | 500.000.000                |                             | 1.340.000.000                        |            |
| 5. Kredit Lunak  | 2002                    | BPR Bank Pasar                | 710.000.000                | 1.000.000.000              |                             | 1.710.000.000                        |            |
| 6. Saham / Modal | 1971                    | BKK se Kab.Tmg                | 203.364.000                | 100.000.000                |                             | 303.364.000                          |            |
|                  | 0                       |                               | 5.997.378.379              |                            |                             | 8.054.911.379                        |            |

1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun

2) Diisi tanggal pada awal bulan atau awal tahun

3) Diisi Periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengantanggal pada saldo akhir